

STRATEGI MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA

Elka Mimin

*Program Studi Pembangunan Pascasarjana Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*

ABSTRAK

Tujuan penelitian dokumentasi ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan akses dan mutu pendidikan dan sekaligus peneliti memberikan sumbangsih strategi dalam mengatasi penyimpangan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dokumentasi yang mana data-data yang bersumber dari beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan dan data laporan resmi dari pemerintah pusat maupun daerah lalu dianalisis. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa tingkat akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang masih rendah.

Kata Kunci: *Strategi; Akses dan Mutu Pendidikan; Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi penentu kejayaan suatu bangsa. Melalui pendidikan suatu bangsa dapat mampu bertahan hidup dan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa lainnya. Pendidikan adalah wadah untuk memanusiakan manusia. Artinya melalui pendidikan peserta didik yang notabenehnya adalah aset bangsa dapat dibentuk dan dikembangkan seluruh potensinya agar peserta didik memiliki ilmu pengetahuan yang luas, keterampilan yang tinggi sikap yang baik.

Dengan adanya pendidikan diharapkan muncul anak bangsa yang cerdas secara fisik dan mental. Begitu pentingnya pendidikan untuk kemajuan suatu bangsa, maka akses dan mutu pendidikan perlu diratakan pada seluruh wilayah di Indonesia.

Secara umum pendidikan diartikan sebagai sebuah wadah yang disiapkan secara sadar untuk bertujuan mencerdaskan peserta didik baik itu secara kognitif (pengetahuan), keterampilan (motorik) dan sikap (afektif). Dilihat dari ruang lingkungannya pendidikan secara garis besar dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pendidikan nonformal yakni Pendidikan yang dilakukan dalam keluarga, Pendidikan informal adalah Pendidikan yang dilakukan dalam kelompok masyarakat seperti organisasi, pelatihan dan kursus. Sedangkan Pendidikan formal adalah Pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, pengertian Pendidikan formal berdasarkan (UU 2003) nomor 20 tentang sistem Pendidikan nasional pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa "Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan formal dibentuk secara sistematis dan terstruktur serta memiliki jenjang yakni mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi seperti Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) dan sejenisnya, Sekolah Dasar (SD) dan sejenisnya, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sejenisnya, Sekolah Menengah Atas SMA dan sejenisnya hingga Perguruan Tinggi (PT) dan sejenisnya.

Pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara. Maju tidaknya suatu negara ditentukan oleh akses dan mutu pendidikannya. Negara yang maju identik dengan akses Pendidikan yang tidak hanya tinggi secara kuantitas namun juga kualitasnya.

Father founding atau para pendiri bangsa telah menyadari secara sungguh-sungguh betapa pentingnya Pendidikan bagi kecerdasan bangsa. Sehingga lahir Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang mengatur mengenai pentingnya setiap penduduk mendapatkan Pendidikan yang selengkap-lengkapnya. Pada Pasal 31 ayat (1) berbunyi Setiap warga berhak mendapat pendidikan; kemudian ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Akan tetapi dalam praktiknya akses terhadap pendidikan dalam masyarakat belum dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan (Syafii 2018) bahwa memang masih banyak terdapat daerah terdepan terluar dan tertinggal yang membutuhkan banyak sentuhan Pendidikan baik itu akses maupun mutu. Untuk menuju pendidikan yang bermutu hal pertama yang harus dipenuhi yaitu penyetaraan akses Pendidikan. Artinya untuk mencapai pendidikan yang bermutu, penyetaraan akses pendidikan harus diselesaikan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih jauh mengenai analisis ketimpangan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dokumentasi dimana data-data bersumber dari beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan dan data laporan resmi dari pemerintah pusat maupun daerah lalu kemudian data-data tersebut dianalisis.

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif dokumentasi ini adalah agar dapat menjadi suatu bahan pertimbangan bagi setiap para pemangku kepentingan di daerah yang tentunya akan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat Pegunungan Bintang.

PEGUNUNGAN BINTANG DALAM ANGKA (AKSES & MUTU PENDIDIKAN)

Dalam kehidupan manusia baik sebagai individu, kelompok, masyarakat, suku maupun bangsa tentunya membutuhkan Pendidikan agar mampu hidup dengan layak. Hal ini menjadikan Pendidikan sebagai salah-satu kebutuhan primer yang harus diperhatikan secara serius. Dengan demikian pemerintah melalui visi misinya yang diturunkan dalam berbagai program terus berupaya meningkatkan akses dan mutu Pendidikan nasional.

Pengukuran terhadap berhasil tidaknya pembangunan suatu daerah ditentukan oleh berhasil tidaknya pembangunan terhadap manusianya sehingga pendidikan merupakan alat penunjang yang berperan penting dalam proses pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah digunakan sebuah alat ukur yakni data statistik yang memiliki begitu banyak indikator termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah-satunya. IPM dihitung dari rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengeluaran dan indeks Pendidikan.

(IPM) Indonesia tahun 2019 berada di angka 71, 94 dimana untuk Pendidikan rata-rata lama sekolah 8, 34 tahun artinya masyarakat Indonesia rata-rata mampu mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat akses pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah.

Untuk mengukur apakah pemerintah daerah telah berhasil mencerdaskan masyarakatnya melalui pemberian akses yang luas untuk pendidikan dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses Pendidikan. Angka akses terhadap Pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat melalui IPM setiap provinsi di Indonesia.

Minimnya IPM dipengaruhi oleh minimnya IPM setiap provinsi di Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia provinsi yang memiliki angka IPM tertinggi yaitu provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki IPM sangat tinggi yakni berada di angka 80, 77 persen sedangkan Provinsi yang memiliki IPM rendah di Indonesia yaitu Provinsi Papua dengan angka 60, 44 (lihat gambar 1. 1). Provinsi Papua secara angka IPM memiliki penurunan yang semula 60, 84 di tahun 2019 turun menjadi 60, 44 persen.

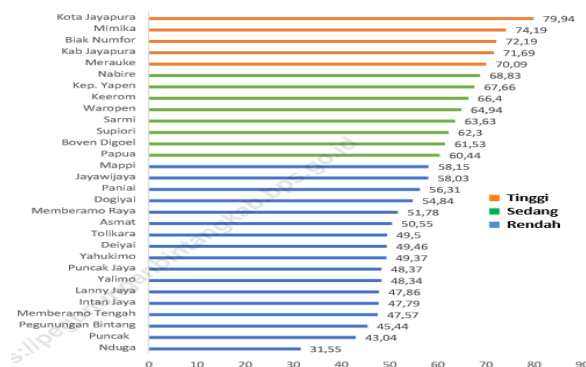
Gambar 1. 1 Peta IPM Papua



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pegunungan Bintang:

Rendahnya IPM Provinsi Papua ini dipengaruhi oleh rendahnya IPM setiap kabupaten di Papua. Dari 28 kabupaten di provinsi Papua, kota Jayapura berada pada angka 80, 16 persen sehingga tergolong memiliki IPM sangat tinggi, sedangkan ada tiga Kabupaten yang tergolong memiliki angka IPM rendah yaitu Kabupaten Nduga dengan angka 30, 75, Kabupaten Puncak 42, 70 dan Kabupaten Pegunungan Bintang berada pada angka 45, 21.

Grafik 1. 1 IPM Setiap Kabupaten Di Provinsi Papua



Sumber: BPS, 2020

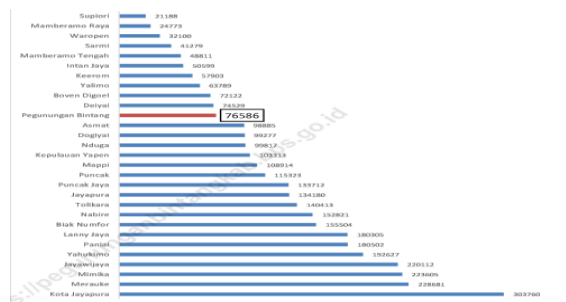
Berdasarkan Grafik 1. 1 IPM Kabupaten Pegunungan Bintang masih sangat rendah karena berada diangka 60an, dimana perkembangan IPM Perkabupaten di Papua Pegunungan Bintang menduduki peringkat ke 27 dari 29 kabupaten di provinsi Papua. Sehingga sangat penting bagi semua para pengambil keputusan untuk melakukan upaya-upaya kongkrit agar masyarakat pegunungan Bintang bangkit dari ketertinggalan khususnya pemerataan akses dan mutu pendidikan.

Kependudukan

Kabupaten Pegunungan Bintang dimekarkan pada tahun 2003 dengan 34 distrik dan 227 kampung. Jumlah penduduk berdasarkan (BPS 2020b) tahun 2020 berjumlah 76. 586 jiwa, yang terdiri dari 40. 312 jiwa penduduk laki-laki dan 36. 274 jiwa penduduk perempuan. Secara absolut, jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang mengalami kenaikan dari tahun 2019, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1, 05 persen.

Grafil 1. 2

Pertumbuhan Penduduk Perkabupaten



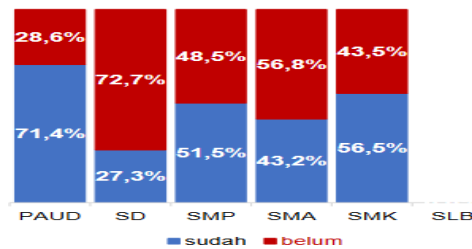
Sumber: BPS, 2020

Mutu Guru

Mutu pendidikan selain ditentukan oleh kurikulum yang relevan dan sarana prasarana yang memadai tentunya ditentukan juga oleh mutu atau kualitas guru. Salah-satu indikator dari mutu guru yaitu sertifikasi guru. Guru yang sudah lolos kualifikasi sertifikasi guru merupakan tenaga pendidikan yang handal yang memiliki kompetensi ahli pada bidangnya masing-masing. Semakin banyak guru yang memiliki sertifikasi kualifikasi akan menunjang kualitas pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP dan SMA di seluruh Indonesia.

Jumlah guru yang sudah berkualifikasi di Indonesia masih rendah dibawah 50%. Berdasarkan data (Kemendikbud 2019) grafik 1. 3 dapat dilihat bahwa pendidik tersertifikasi di Pegunungan Bintang masih rendah. Kategori rendah itu dapat dilihat pada PAUD guru terqualifikasi di PAUD 71, 4% sudah dan 28, 6% belum, SD 27, 3% sudah 72, 7% belum, SMP 51, 5% sudah 48, 5% belum, SMA sudah 43, 2% belum 56, 8% dan SMA sudah 56, 5% dan belum sebesar 43, 5%. Artinya secara rata-rata hampir sebagian guru di Pegunungan Bintang masih belum tersertifikasi.

Grafik 1. 3 Data Pendidik Tersertifikasi 2019



Sumber: Kemdikbud, 2020

Rasio Guru, Murid dan Sekolah

Rasio murid dan guru adalah perbandingan antara masing-masing aspek baik itu guru maupun murid. Rasio guru dan murid di Pegunungan Bintang dapat dilihat pada tabel 1. 4.

Tabel 1. 4 Rasio Sekolah, Guru dan Murid Kab. Pegunungan Bintang 2019

GURU:SISWA				
SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1 : 56	1 : 23	1 : 14	1 : 10	-

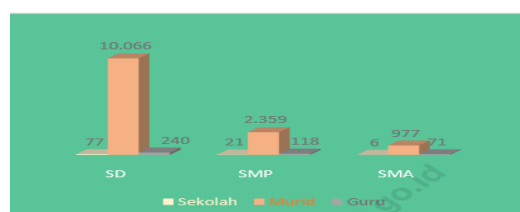
ROMBEL:SISWA				
SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1 : 23	1 : 25	1 : 25	1 : 20	-

Sumber: Kemendikbud, 2019

Berdasarkan tabel 1. 4 rasio antara guru dan murid menunjukkan bahwa untuk SD rasio antara guru dan siswa 1: 56 dimana 1 guru mengajar 56 siswa artinya rasio antara guru dan siswa SD di pegunungan Bintang masih belum ideal karena dalam PP tetang guru tahun 2008 sudah mengatur bahwa rasio antara guru SD dan Siswa SD adalah 1 guru dan 20 siswa. Hal serupa juga terjadi pada SMP dimana 1 orang guru harus mengajar 23 siswa tentunya ini bertentangan dengan rasio ideal guru dan siswa dimana SMP adalah 1: 20 atau 1 orang guru dan 20 orang siswa. (Permen 2008) tentang guru pasal 17 sudah diatur bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut: untuk TK, RA, atau yang sederajat 15: 1; untuk SD atau yang sederajat 20: 1; untuk MI atau yang sederajat 15: 1; untuk SMP atau yang sederajat 20: 1; untuk MTs atau yang sederajat 15: 1; untuk SMA atau yang sederajat 20: 1; untuk MA atau yang sederajat 15: 1; untuk SMK atau yang sederajat 15: 1; dan untuk MAK atau yang sederajat 12: 1.

Sementara itu, berdasarkan (BPS 2020c) rasio antara guru, murid dan sekolah di Pegunungan Bintang juga menunjukkan hal yang sama yakni rasio antara guru dan murid serta sekolah belum ideal.

Tabel 1. 5 Rasio Murid, Guru dan Sekolah



Sumber: BPS, 2020

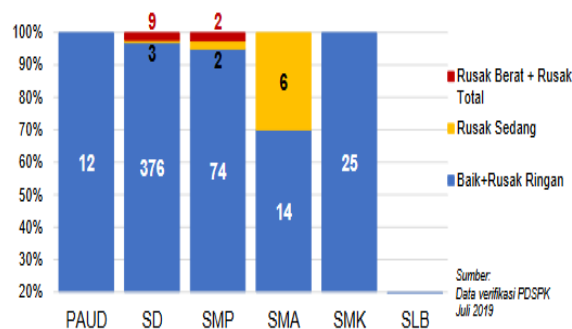
Berdasarkan table 1. 5 menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara rasio murid, sekolah dan guru di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dimana dapat dilihat bahwa akses terhadap Pendidikan dasar yakni SD cukup merata namun di SMP menurun kemudian jenjang SMA semakin menurun.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal penting yang menunjang jalannya proses belajar mengajar. Sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti bangunan sekolah, ruang kelas, buku cetak, papan tulis dan sebagainya.

Kondisi ruang kelas sebagai salah-satu indikator sarana sekolah terlihat pada grafik 1. 4. berdasarkan grafik 1. 4 menunjukkan bahwa kondisi Sarana dan prasarana khususnya ruang kelas pada hamper semua jenjang pendidikan di Pegunungan Bintang rata-rata rusak. Untuk jenjang PAUD dan SMK tergolong baik hanya rusak ringan, sedangkan jenjang SMA masuk kategori rusak sedang sementara itu jenjang SD dan SMP masuk kategori rusak berat ditambah rusak total.

Grafil1 1. 4 Kondisi Ruang Kelas Tahun 2019

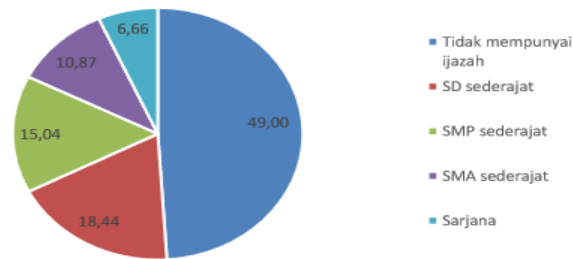


Sumber: Kemdikbud, 2019

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Berdasarkan data (BPS 2020b) Pada tahun 2019, penduduk usia 25 Tahun ke atas di Kabupaten Pegunungan Bintang rata-rata hanya menghabiskan waktu selama 2. 61 tahun dalam menempuh Pendidikan formal. Artinya bahwa penduduk diusia tersebut hanya mengenyam pembelajaran formal setara kelas 2-3 SD. Harapan lama penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang Usia 7 tahun ke atas hanya berpeluang untuk menempuh dunia Pendidikan hingga kelas 6 SD yaitu Selama 6, 14 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa harapan lama sekolah masih rendah Kabupaten Pegunungan Bintang rendah.

Diagram 1. 1 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki di Kabupaten Pegunungan Bintang 2020



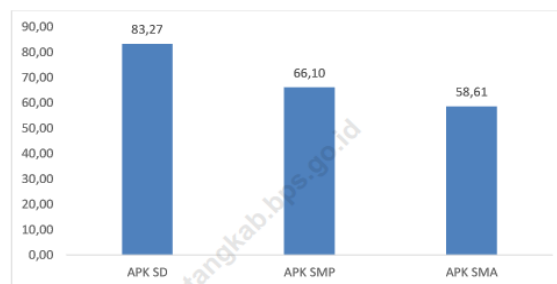
Sumber: BPS, 2020

Berdasarkan data (BPS 2020b) (lihat diagram 1. 1) tercatat bahwa penduduk Pegunungan Bintang yang berijazah SD, SMP, SMA, dan Diploma/Sarjana di Kabupaten Pegunungan Bintang berturut-turut sebesar 18, 44persen, 15, 04persen, 10, 87persen dan 6, 66persen. Artinya semakin tinggi tingkat Pendidikan akses masyarakat Pegunungan Bintang kemampuan akses terhadap pendidikan semakin rendah. Hal serupa juga disampaikan oleh (BPS 2020a) bahwa "semakin tinggi jenjang Pendidikan, persentase penduduk yang menamatkan jenjang Pendidikan tersebut semakin sedikit". Tentunya ini merupakan permasalahan Pendidikan yang sangat serius.

Angka Partisipasi Kasar (APK):

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Capaian aspek Pendidikan salah-satunya yaitu APK, namun data APK tahun 2018 di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka akses pendidikan semakin turun.

Grafil 1. 5 APK Kab. Peg. Bintang Tahun 2020



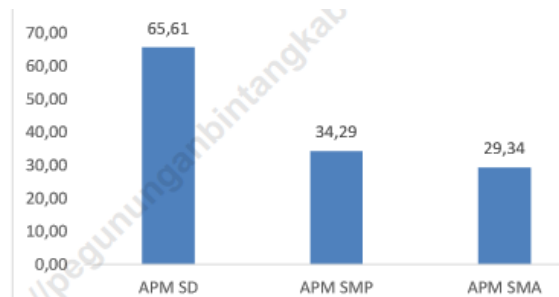
Sumber: BPS, 2020

Dari grafil 1. 5 tercatat bahwa tahun 2020 angka APK Kabupaten Pegunungan Bintang pada jenjang SD sebesar 83, 27. Artinya sebanyak 83, 27persen murid sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD tanpa melihat umurnya, demikian pula angka partisipasi kasar untuk SMP dan SMA 66, 1. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari anak berusia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP dan SMA dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan dibawah atau diatasnya, atau mungkin juga mereka tidak sekolah lagi. Oleh karena itu, untuk memperjelas

lagi arti angka partisipasi kasar diperlukan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Murni (APM)

Grafil 1. 6 APM Pegunungan Bintang Tahun 2020



Sumber: BPS, 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Grafil 1. 6 menunjukkan bahwa APK SD masih tergolong baik, sedangkan APM SMP berada di 34, 29% sedangkan APM SMA berada di 29, 34%. Artinya APM Pegunungan Bintang khususnya SMP dan SMA masih tergolong rendah. Hal ini juga disampaikan oleh (Syafii 2018) bahwa angka partisipasi murni di wilayah terdepan terendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang yang berkisar antara 29 koma 25.

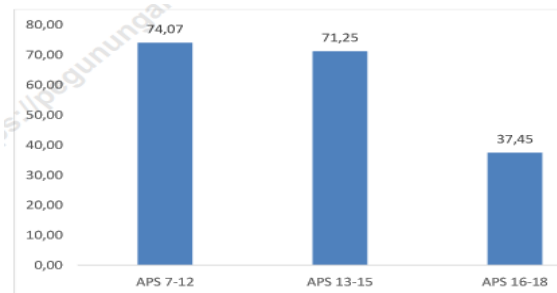
APK jenjang SD tahun 2020 sebesar 83, 27persen sedangkan APM SD hanya sebesar 65, 61persen. Artinya murid SD berumur 7-12 tahun terdapat sebanyak 65, 61persen. Sedangkan selisih antara APK dan APM adalah 17, 66persen sehingga dapat dikatakan bahwa 17, 66persen ada diantara murid SD/ sederajat yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. Kemudian bagaimana dengan angka partisipasi sekolah kabupaten Pegunungan Bintang?

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Makin tinggi angka partisipasi sekolah berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Grafil 1. 11 adalah angka APS Kab. Pegunungan Bintang dimana SD usia 7-12 berada di golongan tinggi sedangkan untuk SMP usia 13-15 di 71, 25 kemudian SMA di angka 37, 45% artinya APS SMA di kabupaten Pegunungan Bintang lebih rendah.

Grafil 1. 7 APS Pegunungan Bintang Tahun 2020



Sumber: BPS, 2020

Berdasarkan data Susenas 2020, capaian APS Kabupaten Pegunungan Bintang yang berdiri sejak tahun 2003, masih belum memenuhi target wajib belajar 9 tahun. Gambaran ini tercermin dari nilai APS yang masih relatif rendah. Tercatat pada tahun 2020 nilai APS usia 7-12 tahun sebesar 74, 07; APS usia 13-15 tahun sebesar 71, 25; dan APS usia 16-18 tahun sebesar 37, 45. Masih banyaknya anak usia sekolah yang belum terserap di semua jenjang pendidikan sehingga perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus ekstra pembangunan di sektor Pendidikan (BPS 2020a).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Pegunungan Bintang dinilai meningkat dari tahun kemarin. Tahun 2018 adalah sebesar 1560, 64 Milyar kemudian mengalami peningkatan sekitar 0, 18 persen sehingga di tahun 2019 menjadi 1. 563, 41 Milyar (lihat tabel 1. 6).

Tabel 1. 6

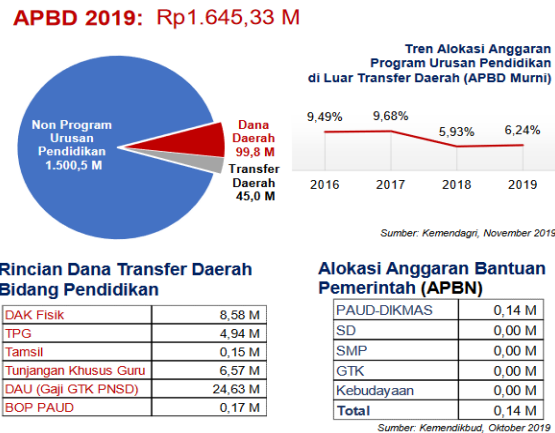
APBD Pegunungan intang Tahun 2019

Anggaran	2018	2019
APBD (Miliar Rp)	1 560,64	1 563,41
DAU (Miliar Rp)	851,06	867,56
DAK (Miliar Rp)	260,41	297,35
PAD (Miliar Rp)	11,85	23,83

Sumber: BPS, 2019

Sementara itu, menurut data kemdikbud 2019 pada table 1. 7 dana APBD dan APBN memang cukup namun ketimpangan akses maupun mutu Pendidikan masih rendah. Sehingga diharapkan agar keuangan daerah dapat dikelola dengan baik dan benar agar mampu menunjang pembangunan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Tabel 1. 7 Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebesar



FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Fenomena permasalahan ketimpangan akses Pendidikan di Indonesia bukan hal baru, permasalahan ini juga masih terjadi di daerah-daerah lainnya termasuk Kabupaten Pegunungan Bintang salah-satunya. Sehingga perlu untuk diperhatikan dengan serius mengingat begitu pentingnya peran pendidikan dalam proses pembangunan sumber daya manusia.

Data statistik dan penelitian-penelitian terdahulu sudah menyampaikan informasi bahwa memang masih banyak wilayah di Indonesia yang belum mengenyam bangku Pendidikan yang layak khususnya di wilayah yang tergolong tertinggal, terdepan dan terluar atau wilayah 3T (Syafii 2018). Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukan adalah melihat secara jeli faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan akses masyarakat pada Pendidikan khususnya masyarakat Pegunungan Bintang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang sekiranya yang mempengaruhi ketimpangan akses dan mutu pendidikan diharapkan para pengambil keputusan dapat mengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Selanjutnya (Syafii 2018) mendeskripsikan beberapa faktor yang mempengaruhi kesenjangan Pendidikan di daerah (3T) antara lainnya: 1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Infrastruktur, 3) Kinerja dan Kesejahteraan Guru, 4) Proses Pembelajaran yang masih konvensional, 5) Kuantitas dan kualitas buku yang belum memadai, 6) masih terjadi konflik di beberapa daerah tertentu 7) Kemampuan sistem pendidikan nasional yang masih lemah, 8) keterbatasan anggaran yang dimiliki, 9) pendidikan yang belum berbasis pada masyarakat dan potensi daerah. Selain itu, untuk akses pendidikan di beberapa wilayah juga menunjukkan ketimpangan yang hampir sama. Dimana akses pendidikan di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan (Perdana, N 2019).

Berdasarkan data statistik tahun 2020 dirilis bahwa tenaga pengajar seperti guru dan prasarana seperti bangunan sekolah adalah permasalahan utama bidang Pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang (BPS 2020a). Hal serupa juga dikatakan oleh (Yanthy, N, O; Sitorus, Y, L 2019) bahwa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan sehari-hari seperti perlengkapan fasilitas transportasi dan fasilitas sekolah masih

menjadi salah satu kendala besar dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang khususnya pembangunan pendidikan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Sedangkan menurut (Perdana, N 2019) ada beberapa faktor penyebab kesenjangan pendidikan antar wilayah yakni: geografi/jarak ke sekolah; sejarah; politik di suatu daerah; kebijakan pemerintah terhadap suatu daerah; dan sebagainya.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini dinilai banyak pihak belum berkualitas, sebagai indikatornya adalah kualitas *Human Development Index* (Indeks Kualitas Manusia) berada di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Thailand, bahkan Vietnam. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia antara lain: proses pembelajaran belum memperoleh perhatian optimal, masih ada para pendidik tidak memahami fungsi dan tujuan dari pendidikan. Guru lebih banyak bekerja sendirian, forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) belum berfungsi optimal. Dengan tidak diketahuinya fungsi dan tujuan dari pendidikan tersebut oleh pendidik maka suatu pendidikan akan tidak terarah atau tidak mencapai suatu tujuan pendidikan (Astawa, I, N 2017).

Berbicara mengenai mutu pendidikan tentunya tidak terlepas dari mutu kurikulum, mutu sarana prasarana dan mutu guru. Guru yang bermutu merupakan modal dasar dalam pembangunan manusia (peserta didik), melalui jasa guru pengetahuan dan karakter peserta didik akan terbentuk.

Menurut (Utomo, E & Haenilah, E 2019) upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan upaya peningkatan mutu guru. Sehingga perlu dilakukan kebermutuan proses pendidikan guru karena guru merupakan pelaku utama dalam pembangunan SDM yang handal". Mengajar juga sebagai bentuk tanggungjawab guru secara profesional, namun dalam praktiknya banyak guru mengalami kesulitan baik itu mengenai kualitas dirinya, sarana prasarana dan kurikulum yang relevan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Subandi & Irianto 2015) bahwa para guru di pedalaman Papua ini masih mengalami beragam problematika. Guru-guru yang bertugas di pedalaman Papua tentunya berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan-kesulitan tertentu yang harus dihadapinya, seperti minimnya fasilitas maupun alat peraga yang dapat menunjang proses pembelajaran.

Begitu strategisnya peran seorang guru maka segala hal yang memiliki potensi pengaruh terhadap kinerja guru seperti gaji pokok guru, gaji tunjangan guru dan lain sebagainya perlu disikapi dengan serius. Tugas utama guru yakni mengajar dan mendidik, hal ini cenderung membuat persepsi pada masyarakat umum bahwa keberhasilan peserta didik merupakan mutlak kewajiban guru.

Sehingga guru sering dituntut agar mampu melaksanakan kewajiban hakikinya yakni mengajar dengan baik dan benar secara profesional agar siswa bisa berprestasi. Fenomena yang terjadi dilapangan lebih memperhatikan dan menuntut kewajiban guru namun hak nya diabaikan, hal ini tentunya dipengaruhi oleh minimnya sertifikasi guru.

STRATEGI MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN

Berdasarkan paparan data baik penelitian terdahulu dan data laporan pemerintah diketahui bahwa akses dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah terutama di Kabupaten Pegunungan Bintang. Maka semua para pemangku kepentingan baik itu Pemerintah daerah sebagai lembaga resmi pengambil keputusan dan masyarakat atau keluarga sebagai komponen penting bangsa harus memiliki rasa peduli dan tanggungjawab yang besar sesuai dengan perannya masing-masing sungguh-sungguh serius dalam melakukan upaya kongkrit untuk mencerdaskan bangsa.

Ada beberapa strategi yang ditawarkan penulis yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh para pemangku kepentingan baik itu pemerintah dan masyarakat terlebih khusus orangtua agar akses dan mutu pendidikan dapat meningkat. Adapun beberapa strategi tersebut adalah: (1) Peran pemerintah daerah. Pemerintah perlu secara serius memperhatikan akses Pendidikan maupun mutu Pendidikan itu. Pembangunan pendidikan dinilai berhasil ketika setiap indikator akses maupun mutu pendidikan meningkat. Setiap indikator sangat menentukan maju tidaknya pembangunan Pendidikan. (a) *Right man in the Right Place* (orang yang tepat di tempat yang tepat) kalimat ini tentunya merupakan suatu strategi yang umunya patut dilakukan di struktural pemerintahan. Dengan menempatkan orang yang tepat (latar belakang pendidikan dan pengalaman sejalan) diyakini mampu memberikan sumbangsih yang baik bagi pembangunan sumber daya manusia pada akses dan mutu pendidikan. (b). Pembangunan sarana sekolah misalnya sekolah satu atap merupakan salah-satu solusi untuk meningkatkan akses pendidikan disemua jenjang baik itu TK, SD, SMP dan SMA. (c). Pemerintah perlu membangun sekolah berpola asrama, dengan demikian segala kebutuhan peserta didik bisa dikontrol dengan muda, selain itu daya focus belajar peserta didik bisa meningkat. (d) pengembangan kurikulum yang relevan, artinya kurikulum pendidikan sebaiknya dikembangkan sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat setempat. Misalnya dengan dikembangkannya kurikulum nasional dengan *local wisdom* (kearifan lokal) yang mana hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) tentang standar kurikulum nasional. (2). Keterlibatan masyarakat/orangtua. tanggung jawab pengembangan pendidikan sebagai proses sosialisasi adalah berada pada orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan. Sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat atau orangtua dalam setiap kegiatan sekolah.

Menurut (Astawa, I, N 2017) peran serta orangtua dalam memajukan pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti (a) berperan dalam penggunaan jasa pelayanan yang disediakan seperti (misalnya: jasa kesehatan, jasa perlengkapan pebelajaran dan sebagainya). (b) keterlibatan orangtua dalam proses penyumbangkan kontribusi dana, bahan, dan tenaga maupun pikiran/pendapat mengenai pengembangan sekolah. (c) aktif secara kewajiban misalnya pembayaran komite sekolah. (d) peran serta melalui adanya konsultasi. (e) peran serta dalam pelayanan, misalnya keterlibatan orangtua dalam kegiatan-kegiatan sekolah misalnya rekreasi dan sebagainya. (f) peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya sekolah meminta orang tua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah jender, gizi, dsb. (g) keterlibatan orangtua pada pengambilan keputusan. Orang tua/masyarakat terlibat dalam pembahasan permasalahan pendidikan yang dialami anak baik itu permasalahan akademis maupun non akademis.

Keterlibatan semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat atau orangtua yang bekerjasama sesuai tupoksi masing-masing dapat diyakini menjadi kekuatan super

yang mampu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Daftar Pustaka

- Astawa, I, N, T. 2017. "Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia. " *Jurnal Penjaminan Mutu* 3(2): 197. doi: 10.25078/jpm. v3i2. 200.
- BPS. 2020a. *Indeks Pembangunan Manusia Pegunungan Bintang*. Kabupaten Pegunungan Bintang.
- BPS. 2020b. *Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Angka*. Kabupaten Pegunungan Bintang.
- BPS. 2020c. *Statistik Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang*.
- Kemendikbud. 2019. *Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang*.
- Perdana, N, S. 2019. "Implementasi Ppdb Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan. " *Jurnal Pendidikan Glasser* 3(1): 78–92. doi: 10.32529/glasser. v3i1. 186.
- Permen. 2008. "Peraturan Pemerintah. " 49(4): 69–73. Retrieved (http://www.ramr.org/articulos/volumen_8_numero_2/casuistica/casuisticas_emangioendotelioma_epitelioides_de_pleura.pdf; <https://www.hindawi.com/journals/crira/2017/5972940/>; <http://www.echeat.com/free-essay/Understanding-the-Basics-of-American-Football-31>).
- Subandi & Irianto. 2015. "Studi Fenomenologis Kebahagiaan Guru Di Papua. " *Gajah Mada Journal Psychology* 1(3): 140–66. doi: 10.22146/gamajop. 8812.
- Syafii, A. 2018. "Perluasan Dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). " *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 4(2): 1–11. doi: 10.12928/psikopedagogia. v1i2. 4603. 154.
- Utomo, E & Haenilah, E, Y. 2019. "Belajar Melalui Bermain Anak Usia Dini Meretas Pendidikan Berkelanjutan Untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). " *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan: Trend, Issue, Dan Inovasi Pembelajaran Berbasis Sustainable Development* 1(1).
- UU. 2003. "Sistem Pendidikan Nasional. " *Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan* 159–70.
- Yanthy, N, O; Sitorus, Y, L, M. 2019. "Pembangunan Di Kabupaten Pegunungan Bintang. " *Jurnal Perencanaan Wilayah Kota* 2(1): 3–17.

